

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setelah koalisi kebangsaan tidak berhasil menempatkan Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi menjadi presiden dan wakil presiden pada pemilihan Umum 2004, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) setahun kemudian memproklamkan diri sebagai partai oposisi. Komisi politik dan pemilu Dewan Pengurus pusat PDI Perjuangan (DPP PDIP) secara jelas menyebutkan bahwa oposisi yang dipraktekkan PDI Perjuangan adalah oposisi yang efektif, mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak memihak rakyat, dan memberikan alternatif kebijakan yang memihak rakyat. Sikap politik itu kemudian diteruskan dengan membentuk kabinet bayangan (*shadow cabinet*) sebagai instrumen yang digunakan PDI perjuangan untuk menyampaikan kritik serta mengajukan alternatif kebijakan secara programatis dan dapat direalisasikan pada masyarakat luas.

Secara historis dalam perjalanan sistem kepartaian di Indonesia, pilihan PDI Perjuangan mengambil sikap sebagai partai oposisi secara terbuka dapat dikatakan sebagai pilihan yang fenomenal, terutama dalam kurun waktu lima puluh tahun terakhir ini. Sejarah mencatat bahwa Soekarno, Soeharto dan Abdurrahman Wahid memang berhasil diturunkan dari kekuasaannya melalui konsolidasi kekuatan oposisi, tetapi oposisi dalam ketiga kasus tersebut hanya bersifat merebut kekuasaan. Orientasi kerja kelompok oposisi selama ini hanya

berputar pada masalah menggulingkan dan merebut kekuasaan untuk kemudian dibagikan kepada sekutunya masing-masing. Kasus Soekarno misalnya, hampir seluruh kekuasaan oposisi saat itu langsung berubah menjadi penguasa, rezim orde baru kemudian terbentuk dan berkembang pesat. Sedangkan dalam kasus Soeharto, aksi politik dari oposisi pasca lengser keprabon masih harus bertarung dengan kekuatan status quo pendukung orde baru dan terpaksa melakukan kompromi politik akibat tidak adanya strategi komprehensif yang kuat atas cara-cara penyelesaian politik pasca penggulingan.

Oposisi pada era Soekarno sempat berkibar pada masa pemerintahan parlementer, namun bisa dikatakan bahwa oposisi tidak diperlukan karena masalah integrasi bangsa dan nasionalisme masih rawan. Maka Soekarno pun berusaha mengkonsolidasikan kekuatan politik nasional dengan jargon nasakomnya. Disahkannya Pancasila sebagai dasar ideologi negara Indonesia pada sisi lain ternyata juga berhasil mencegah tumbuhnya perkembangan oposisi. Sila Persatuan Indonesia yang sangat diagungkan Soekarno menjadi senjata ideologis untuk menumpas lawan-lawan politiknya, baik di dalam maupun di luar negeri. Soekarno menegaskan bahwa musuh bangsa yang utama adalah kolonialisme dan imperialisme. Demokrasi terpimpin yang diperkenalkannya adalah sebuah kesalahan karena terus mengikis dan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Dalam aspek nasionalisme usaha-usaha Soekarno memang berhasil, tetapi dalam aspek demokrasi sikap politik Soekarno tersebut terus membendung perkembangan oposisi.

Soeharto tidak banyak berbeda dengan Soekarno. Ketika melihat ruang oposisi mulai meluas, tidak lama kemudian dibuatlah kebijakan yang membatasi partai-partai politik hanya menjadi dua partai dan satu golongan karya. Penerapan dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), yang sekarang lebih dikenal dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak lain sebagai fungsi pengawasan terhadap kemungkinan tumbuhnya gerakan oposisi di tingkat pedesaan. Namun akibat kebijakan massa mengambang dan politik rekayasa pemilu pada akhirnya semakin mengunci kesadaran rakyat untuk memainkan fungsi-fungsi oposisi.

Kehadiran oposisi sebenarnya merupakan suatu kondisi normal dalam sistem demokrasi. Namun format oposisi lazimnya berbeda-beda pada setiap negara demokrasi karena amat tergantung pada sistem pemerintahan dan sistem kepartaian yang berlaku. Format oposisi dalam sistem pemerintahan presidensial jelas berbeda dengan pola oposisi dalam sistem pemerintahan parlementer. Begitu pula format oposisi dalam sistem multipartai tidak sama dengan oposisi dalam sistem dua partai dominan, di mana ada koalisi partai yang memerintah di satu pihak dan koalisi partai oposisi di pihak lain.

Oposisi yang ideal diharapkan tidak hanya mengkritisi kinerja pemerintah, akan tetapi bisa turut serta dalam membangun kesadaran berpolitik bagi warganya dan mengawasi atau mengontrol pemerintah demi terciptanya sebuah *Good Governance*. Hal ini di ungkapkan oleh Arbi Sanit (1985 : 5) “Partai oposisi adalah partai atau sekelompok partai politik yang memosisikan diluar pemerintahan dan menjalankan fungsi kontrol secara kritis terhadap pemerintah.”

Oleh karena itu, oposisi harus dipahami sesuai dengan hakikat dan pengertian oposisi itu sendiri. Sehingga diharapkan kita sebagai masyarakat dapat mewujudkan demokratisasi melalui penerapan makna oposisi yang semestinya. Dalam mengantarkan pemahaman masyarakat (dalam hal ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) mengenai oposisi dalam perspektif pendidikan politik ini, maka perlu memahami beberapa hal berikut:

Pertama, diperlukannya kekuatan oposisi sebagai kekuatan penyeimbang (*check and balances*) terhadap pemerintah. Namun, kebijakan oposisi di Indonesia yang dalam hal ini dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P), dianggap tidak sesuai dengan penerapan fungsi oposisi yang seharusnya ada dalam negara demokrasi.

Kedua, salah satu fungsi partai politik menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 (Pasal 31 ayat 1):

Fungsi Partai Politik adalah melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan antara lain:

- a. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- c. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Selain itu, partai politik merupakan salah satu agen pendidikan politik.

Berkaitan dengan oposisi ini, karena yang menjalankan atau menerapkan oposisi ini adalah partai politik, dan partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik, maka kita dapat mengetahui adanya keterkaitan antara oposisi dengan

pendidikan politik, termasuk didalamnya adalah memahami oposisi dalam perspektif pendidikan politik.

Pendidikan politik tidak hanya penting bagi masyarakat, tetapi juga penting untuk kader partai. Pendidikan politik kader bangsa secara umum bertujuan memberikan bekal pengetahuan dalam rangka memperluas cakrawala politik, sebagai sumbangsih nyata dalam upaya penanaman nilai-nilai peradaban politik bagi rakyat, sehingga pada gilirannya akan melahirkan ide-ide yang mampu menjadi penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional.

Pendidikan politik menurut Rusadi Kartaprawira (1988:54) dipahami sebagai:

Upaya meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya, sesuai dengan paham kedaulatan rakyat atau demokrasi bahwa rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi.

Berkaitan dengan hal ini A. Kosasih Djahiri (1995 :18) menyatakan bahwa:

Pendidikan politik adalah pendidikan atau bimbingan, pembinaan warga negara suatu negara untuk memahami mencintai dan memiliki rasa keterikatan diri (sense of belonging) yang tinggi terhadap bangsa negara dan seluruh perangkat sistem maupun kelembagaan yang ada.

Memahami dan memiliki rasa keterikatan diri yang tinggi terhadap bangsa negara dan seluruh perangkat sistem maupun kelembagaan yang ada merupakan ciri sudah atau mulai tertanamnya kesadaran politik. Mengenai pentingnya pendidikan politik ini, Gabriel Almond (1974:47-49) menyebutkan adanya “beberapa agen sosialisasi politik, seperti keluarga, sekolah, kelompok, pergaulan, pekerjaan, media massa, dan kontak politik langsung”. Pentingnya agen-agen atau

sarana-sarana sosialisasi politik, sangat bergantung pada intensitas interaksi individu dengan agen-agen atau sarana-sarana, proses komunikasi, penekunan, dan usia seseorang. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Haryanto (1983:34) :

Besar tidaknya peranan sarana-sarana tersebut bergantung pada tingkat intensitas interaksi individu dan sarana yang ada, proses komunikasi yang berlangsung antara individu dengan sarana tadi, tingkat atau derajat penekunan individu yang mengalami proses sosialisasi politik, dan umur individu yang bersangkutan.

Ketiga, salah satu ciri suatu negara demokrasi adalah adanya pemilu. Pemilu merupakan sarana bagi partai politik untuk mewujudkan tujuan politiknya. Demokrasi merupakan paham yang dianggap paling mendekati atau sesuai dengan keadaan bangsa dan masyarakat Indonesia. Menjadi harapan dan dibutuhkan oleh semua pihak, bila koalisi pemenang pemilihan presiden mampu membentuk kabinet yang anggota-anggotanya berasal dari para profesional dan mampu mengakomodasi aspirasi rakyat. Sejalan dengan hal tersebut *good governance* akan dapat diciptakan apabila koalisi yang kalah dalam pemilihan presiden membentuk suatu kelompok oposisi loyal dan konstruktif dalam melakukan kontrol yang sangat ketat terhadap pemerintahan baru.

Berdasarkan fenomena dan fakta yang terjadi, keberadaan oposisi pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sekarang ini, dapat dipahami bahwa oposisi adalah kombinasi dari pilihan dan keterpaksaan. Keterpaksaan karena presiden terpilih 2004, Susilo Bambang Yudhoyono tidak menghendaki semua partai politik besar bergabung dalam pemerintahan. Kontrol kelembagaan sebenarnya sudah inheren dalam sistem demokrasi dengan adanya *trias politica*.

Lewat *trias politica*, kekuasaan eksekutif dikontrol oleh kekuasaan legislatif (parlemen) dan dijaga jaraknya dari kekuasaan yudikatif. Namun, parlemen bisa berjalan secara efektif sejauh semua partai politik diakomodasi dalam pemerintahan. Jadi, perlu ada partai politik yang tegas tidak mau masuk kabinet agar garis oposisinya lebih tegas, dengan berada di luar pemerintahan PDI Perjuangan dapat membuat perbedaan di mata publik.

Berdasarkan pemaparan masalah diatas maka penulis merasa tertarik untuk menetapkan masalah tersebut dalam suatu kerangka penelitian, sehingga penulis menetapkan judul dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: **OPOSISI DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN POLITIK** (*Studi Kasus Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Periode 2005-2009*)

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsepsi oposisi menurut PDI Perjuangan?
2. Dalam konteks demokrasi dan budaya politik Indonesia bagaimanakah aplikasi oposisi dalam proses pembuatan kebijakan publik?
3. Bagaimana penerapan oposisi sebagai sikap pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan publik?

### C. Pertanyaan Penelitian

Rumusan masalah	Pertanyaan penelitian
<p>Bagaimanakah konsepsi oposisi menurut PDI Perjuangan?</p> <p>Dalam konteks demokrasi, dan budaya politik Indonesia bagaimanakah aplikasi oposisi dalam proses pembuatan kebijakan publik?</p> <p>Bagaimana penerapan oposisi sebagai sikap pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan publik?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah makna oposisi menurut PDIP?</li> <li>2. Model oposisi seperti apa yang sedang dikembangkan oleh PDIP?</li> <li>3. Apakah dalam setiap penyelenggaraan negara perlu ada pihak yang berperan sebagai oposisi? Mengapa?</li> <li>4. Bagaimana strategi oposisi yang diterapkan oleh PDI Perjuangan?</li> <li>5. Apa yang melatarbelakangi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) mengambil kebijakan oposisi ?</li> <li>6. Apa saja manfaat yang diperoleh PDI Perjuangan setelah menerapkan oposisi?</li> <li>7. Dalam konteks artikulasikan kepentingan politik masyarakat, bagaimana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) mewujudkan oposisi dalam proses pembuatan kebijakan publik ?</li> <li>8. Dalam konteks demokrasi dan budaya politik Indonesia bagaimanakah sikap PDI Perjuangan terhadap hasil kebijakan publik yang akan ditetapkan?</li> <li>9. Apa yang dijadikan barometer oleh PDIP untuk menilai kebijakan publik yang dilakukan pemerintah dianggap lalai?</li> <li>10. Apa yang dilakukan PDIP sebagai partai oposisi untuk mengantisipasi agar kebijakan publik berjalan baik?</li> <li>11. Bagaimana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) menjaga konsistensi kebijakan oposisi tersebut ?</li> </ol>



#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis konsepsi oposisi menurut PDI Perjuangan
2. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penerapan oposisi dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan publik oleh pemerintah.
3. Mengetahui dan menganalisis sejauh mana pelaksanaan penerapan kebijakan oposisi dalam pengawasan terhadap kebijakan publik.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Kegunaannya adalah sebagai pengembangan disiplin ilmu yang ditekuni penulis yakni pendidikan kewarganegaraan yang tidak terlepas dari materi politik.

##### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Memberikan gambaran faktual tentang bagaimana penerapan kebijakan oposisi partai politik, khususnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan).
- b. Memberikan gambaran faktual tentang sejauh mana masyarakat (kader partai) dapat merasakan manfaat kebijakan oposisi yang diambil oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dari segi pendidikan politik.

## **F. Definisi Operasional**

### **1. Oposisi**

Marbun (2005 : 386) menjelaskan bahwa “oposisi diartikan sebagai kelompok yang mempunyai pendirian yang bertentangan dengan garis kebijakan kelompok yang menjalankan pemerintahan. Oposisi bukan musuh, tapi lawan dalam percaturan politik.”

### **2. Pendidikan Politik**

Mengenai pengertian dari pendidikan politik (dalam arti kata yang lebih ketat) Alfian (1981:235) mengatakan : “dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk megubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang ideal yang hendak di bangun.”

Hal serupa juga dinyatakan oleh Kartini Kartono (1996: 64) bahwa: “pendidikan politik merupakan upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis/moral dalam mencapai tujuan-tujuan politik.”

Rusadi Kartaprawira (1988:54) memandang bahwa pendidikan politik yaitu:

Sebagai upaya meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya, sesuai dengan paham kedaulatan rakyat atau demokrasi bahwa rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi.

A. Kosasih Djahiri (1995 :18) menyatakan bahwa:

Pendidikan politik adalah pendidikan atau bimbingan, pembinaan warga negara suatu negara untuk memahami mencintai dan memiliki rasa keterikatan diri (sense of belonging) yang tinggi terhadap bangsa negara dan seluruh perangkat sistem maupun kelembagaan yang ada.

Memahami dan memiliki rasa keterikatan diri yang tinggi terhadap bangsa negara dan seluruh perangkat sistem maupun kelembagaan yang ada, ialah merupakan ciri sudah atau mulai tertanamnya kesadaran politik. Dengan demikian pendidikan politik berupaya merubah warga negara agar dapat memiliki kesadaran politik. Memiliki kesadaran politik berarti memiliki keterpaduan aspek kognitif, afektif dan psikomotor dari individu dalam berpolitik.

### **G. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 1988: 3) “Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.”

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Menurut Nazir (1983: 63) “Penelitian deskriptif adalah metode penelitian tentang kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kejadian pada masa sekarang.”

Secara umum menurut Surachmad (1985: 140) penelitian deskriptif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Memusatkan penelitian pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang yaitu masalah yang aktual.

2. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis.

Sedangkan bentuk penelitiannya adalah studi kasus, hal ini seperti diungkapkan oleh Arikunto (1996: 129-130) bahwa “Penelitian kasus adalah penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.” Ditinjau dari wilayahnya, maka penelitian kasus hanya meliputi daerah atau subjek yang sangat sempit. Tetapi ditinjau dari sifat penelitian, penelitian kasus lebih mendalam.

#### **H. Teknik Pengumpulan Data**

Penggunaan teknik penelitian yang tepat akan berguna dalam kelancaran mengungkapkan masalah yang sedang diteliti. Maka atas dasar hal tersebut penulis mencoba menggunakan teknik penelitian sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan/Literatur: Mempelajari bahan-bahan berupa buku-buku acuan, serta dokumen-dokumen lain tentang surat kabar sebagai media pendidikan politik yang kemudian dikaitkan dengan pembentukan kesadaran politik siswa.
2. Observasi, peneliti melakukan pengamatan secara langsung pada kondisi objektif di DPP PDI Perjuangan untuk mengumpulkan data yang terkait dengan objek penelitian.
3. Studi Dokumentasi, “adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, prasasti dan sebagainya. (Arikunto, 1993: 202)”.

4. Wawancara, adalah percakapan dengan maksud tertentu, “Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan pertanyaan atas pertanyaan itu (Moleong, 1988 : 1835)”. Sementara menurut Lincoln dan Guba (1985 : 266) “Maksud dari wawancara itu adalah untuk mengkontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, oraganisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain.”
5. Triangulasi merupakan suatu teknik pemeriksaan data dengan membandingkan data yang diperoleh dari suatu sumber ke sumber lainnya pada saat yang berbeda, atau membandingkan data yang diperoleh dari suatu sumber ke sumber lainnya dengan pendekatan yang berbeda untuk mengecek atau membandingkan data penelitian yang dikumpulkan

## **I. Teknik Analisis Data**

Analisis data, terutama kualitatif terdiri atas kata-kata yang bukan angka-angka. Kata-kata sering hanya mengandung makna dalam konteks kata itu digunakan. Maka analisis data kualitatif dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik, yaitu:

### **1. Reduksi Data**

Data yang diperoleh dari lapangan ditulis dalam bentuk uraian yang terinci. Laporan ini akan terus bertumpuk jika tidak segera dianalisis sejak awal. Laporan-laporan ini perlu direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok,

difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya sehingga lebih mudah dikendalikan.

## 2. Display Data

Agar dapat melihat gambaran keseluruhan hasil penelitian atau bagian-bagian tertentu dari penelitian ini diusahakan membuat berbagai macam matriks, grafik, networks, dan charts.

## 2. Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi.

Sejak mula peneliti berusaha mencari data yang dikumpulkannya. Dari data awal yang diperoleh, sejak awal peneliti mencoba mengambil kesimpulan.

## 3. Analisis data sewaktu pengumpulan data

Data harus segera dianalisis setelah terkumpul dalam bentuk laporan lapangan.

## 3. Lembar rangkuman

Lembaran rangkuman ini gunanya antara lain sebagai pedoman bagi kunjungan lapangan berikutnya, sebagai pegangan pula dalam komunikasi dengan pembimbing, sebagai petunjuk dalam penulisan laporan lapangan dan sebagai dasar untuk melakukan analisa.

## J. Lokasi dan Subyek Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi dan subjek penelitian adalah sebagai berikut :

### 1. Lokasi Penelitian.

Penelitian bertempat di Jakarta, yaitu di Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI Perjuangan).

## 2. Subjek Penelitian.

Subjek penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kader Partai PDI Perjuangan baik pimpinan maupun para fungsionaris partai yang duduk dieksekutif maupun legislatif.



